

Legalisasi Lesbian, Gay Biseksual, Transgender Dan Queer (LGBTQ+) Di Thailand

Honest Dody Molasy ^{1*}, Putri Oktavia ²

^{1,2} Universitas Jember

* honestdody.fisip@unej.ac.id

Abstract: Since 1973, homosexual groups have been excluded from the abnormal category in the Diagnostic Guidelines for Mental Disorders. As a result of this policy, a number of countries legalized LGBTQ+ activities in several forms, including legalizing sexual activity and same-sex marriage. Thailand is the only country in south-east Asia that legalized LGBTQ+ activities. From a legal perspective, Thailand is a country that provides legal protection and is the oldest in terms of validating LGBTQ+. Thailand is also quite synonymous with Ladyboys who are closely associated with the profession of sex workers. Ladyboys in Thailand are called Kathoey. This article analyzes the reasons why Thailand legalized LGBTQ+ activities. The research was conducted using a literature study method, using the concept of Nation Culture Shaping Public Policy developed by Kathrine A. Daniell. This article argues that Thailand's legalization of LGBTQ+ activities is influenced by three things: First, the existence of local actors and instruments, second, cultural generalization through international involvement and the impact on a country's economic behavior.

Keywords: LGBT; Thailand Public policy; Culture Legalization.

1. Pendahuluan

Salah satu Fenomena sosial yang terjadi dalam lingkup global adalah munculnya komunitas dan dukungan terhadap kaum LGBT atau LGBTQ+. LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender, bersama dengan heteroseksual adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Sedangkan LGBTQ+ adalah akronim untuk “lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer” dengan tanda "+”

Hingga awal abad ke 20, orang dengan ciri-ciri dan teridentifikasi gay dianggap mengalami penyakit mental. Pada abad ke 18 dan 19 aktivitas ataupun temuan mengenai perilaku gay dan homoseksual dianggap menyimpang secara sosial dan agama hingga dikriminalisasi. Puncaknya pada tahun 1973, kategori homoseksual dikeluarkan dari kategori abnormal dalam PPDGJ (Panduan Pedoman Diagnostik Gangguan Jiwa) atau DSM (Diagnostic and Statistical Manual). Hingga kini meskipun Gay tidak lagi dianggap sebagai penyakit mental yang perlu mendapatkan pengobatan secara medis, nyatanya masih banyak negara secara mayoritas masih dalam kelompok konservatif, dimana adanya LGBT dianggap sebagai patologi sosial dan bertentangan bagi norma agama, khususnya di kawasan Timur Tengah, beberapa negara di Afrika, dan beberapa negara di Asia khususnya ASEAN.

Masih berakarnya paham konservatif yang menolak keberadaan fenomena LGBT juga seringkali berujung pada tindakan diskriminatif sehingga beberapa pilihan yang tersedia adalah kaum gay mencari perlindungan ke negara lain atau membentuk komunitas untuk memperjuangkan perlindungan hukum di negaranya sendiri. Sehingga dapat dikatakan saat ini meskipun LGBTQ+ cukup dapat diterima dibandingkan pada masa awal abad 20, ruang gerak mereka masih terbatas. Contoh dari penolakan atas adanya Gay salah satunya negara dengan mayoritas muslim yaitu di Iran, seorang pria bernama Alireza Fazeli-Monfared berumur 20 tahun, dibunuh oleh keluarganya sendiri karena dia adalah seorang pria gay. Pembunuhan itu bahkan disebut pembunuhan demi kehormatan, dan tidak ada yang ditangkap dan disalahkan meskipun pihak berwenang tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu.

Pada saat dimana penolakan-penolakan terhadap kaum dan aktivitas LGBT sedang marak-maraknya, penerimaan terhadap homoseksualitas terus tumbuh di Amerika Utara dan sebagian besar Eropa, menurut survei yang dilakukan hampir 38.000 orang di 39 negara. Meskipun banyak negara-negara di dunia khususnya kawasan Amerika dan Eropa sudah mulai menerima kaum dan aktivitas LGBT, namun fenomena LGBTQ+ ini masih dianggap tabu di kawasan Asia, khususnya ASEAN seperti

Malaysia, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Mengenai situasi di beberapa negara anggota ASEAN masih cukup konservatif dan belum menerima gagasan LGBTQ+ nyatanya ada juga beberapa negara yang melegalkan LGBTQ+ dalam beberapa bentuk, baik dalam legalnya aktivitas seksual, dan legal untuk menikah sesama jenis. Contohnya Taiwan sebagai negara pertama yang 2019, dan Thailand sebagai negara yang telah dikenal sudah sejak lama mendekriminalisasi aktivitas seksual seperti homoseksualitas, lesbian sejak tahun 1956.

Dalam situs Equaldex, Thailand menempati urutan ke 3 dalam kategori negara anggota ASEAN yang ramah untuk kelompok LGBTQ+. Thailand adalah negara memberikan perlindungan hukum paling banyak serta paling tua dalam hal validasi kaum LGBTQ+. Di negara-negara ASEAN istilah LGBT juga dikenal istilah Ladyboy. Ladyboy diartikan sama persis dengan LGBT, yaitu saat orang yang terlahir sebagai laki-laki namun saat dewasa memilih berdandan sebagai perempuan dan ada juga yang melakukan prosedur operasi pada alat kelamin untuk mengganti jenis kelaminnya layaknya genital perempuan atau transgender. Di Thailand hal khusus dari Ladyboy ini erat kaitannya dengan profesinya sebagai pekerja seks atau pekerja hiburan malam. Ladyboy di Thailand juga mempunyai istilah tersendiri yaitu dikenal dengan Kathoey.

Thailand sebagai negara dengan agama Budha yang menjadi agama mayoritas mempunyai hubungan dengan fenomena Kathoey, bahwa menurut agama Buddha, Kathoey merupakan sebuah hukuman dari dewa atas perbuatan tidak baik yang pernah dilakukan pada masa lalu, dan menurut biksu-biksu di Thailand siapapun dapat menjadi Kathoey. Pahami agama Budha juga memasukkan Kathoey ke dalam salah satu kategori jenis kelamin. Selain aspek hukum dan agama, di tahun 2002, Kementerian Kesehatan Thailand secara terbuka menyebut bahwa homoseksualitas bukan lagi sebagai sebuah penyakit mental atau sebuah kelainan. Sedangkan dalam aspek militer, pada tahun 2005, angkatan bersenjata Thailand mencabut larangan terhadap LGBT bagi menjalankan tugas di militer.

Dengan serangkaian pandangan akan LGBT di Thailand, ternyata terdapat beberapa upaya di Thailand untuk melegalkan hal selain aktivitas seksual sesama jenis, khususnya dalam pemenuhan hak orang-orang Kathoey atau transgender seperti Proyek PRIDE ILO, Upaya Transnational Advocacy Networks, dan masih banyak lagi upaya-upaya untuk mendorong pemenuhan hak, perlindungan HAM dan pengakuan internasional. Dengan keterbukaan Thailand terhadap komunitas LGBT dalam hal ini salah satunya adalah Kathoey, membuahkan pada konstitusi Thailand yang memasukkan gender ketiga pada penyusunan undang-undang tahun 2015 lalu. Keputusan tersebut merupakan sebuah langkah besar Thailand dalam emansipasi terhadap komunitas LGBT di Thailand yang juga berjumlah sangat besar.

Fenomena LGBTQ+ di Thailand ini juga di latarbelakangi dengan adanya Legalisasi, dimana dapat dimaknai sebagai sebuah perjanjian, apapun bentuknya, memainkan peran yang sangat signifikan dalam hukum baik di tingkat nasional bahkan internasional. Selain sebagai sumber hukum formil, perjanjian juga mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing subyek hukum yang terlibat.

Maka dari itu sebuah legalisasi baik itu untuk perjanjian terlebih apabila untuk suatu rancangan hukum atau undang-undang menjadi sah. Judith Goldstein dkk. Dalam *Introduction: Legalization and World Politics* menyatakan bahwa bentuk legalisasi sebuah perjanjian merupakan salah satu bagian yang sangat vital untuk mengukur efektifitas produk hukum yang dihasilkan (Albayumi, 2012). Dalam KBBI Daring, dicantumkan arti Legalisasi adalah pengesahan (menurut undang-undang atau hukum).

Dalam beberapa hal, legalisasi juga memiliki arti pembuktian bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar ditandatangani oleh para pihak dan proses itu disaksikan oleh seorang petinggi yang memegang peran atau kekuasaan (berwenang). Dalam sebuah kebijakan dalam negara legalisasi juga berarti adalah suatu kondisi dalam kerjasama yang memiliki unsur kewajiban, ketepatan serta delegasi (Mugasejati, 2006). Kewajiban berarti bahwa negara atau aktor yang terikat oleh satu atau serangkaian aturan main atau komitmen sehingga tindakan dari negara atau aktor yang terkait akan di bawah pengawasan aturan main umum yang berlaku. Prosedur dan wacana hukum internasional atau domestik yang telah meratifikasi kesepakatan internasional tersebut.

Dari berbagai proses legalisasi, keterbukaan masyarakat dan pemerintah Thailand terhadap LGBT, maka terdapat hal menarik untuk dibahas atas adanya fenomena dan budaya Kathoey di Thailand yaitu, sebagai salah satu negara di kawasan Asia terutama Asia Tenggara yang cukup konservatif dan kebanyakan menolak adanya LGBT, Thailand mengambil keputusan untuk melegalkan aktivitas seksual sesama jenis sejak lama dan baru-baru ini menyetujui rancangan undang-undang untuk pernikahan sesama jenis. Apabila perangkat perlindungan secara konstitusional untuk kaum LGBT di Thailand

disetujui dan terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa Thailand akan menjadi satu-satunya negara di benua Asia yang memiliki payung perlindungan lengkap bagi kaum LGBT.

2. Methods

Untuk menjawab permasalahan yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan, penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan data yang nantinya akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Studi literatur tidak mengharuskan untuk melakukan observasi lapangan akan tetapi cukup merujuk pada informasi-informasi yang sudah ada dari penelitian lain yang dianggap relevan terhadap isu atau fenomena yang dianalisis. Data yang diperoleh, kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif berupaya untuk menggambarkan fakta-fakta dengan memberi data yang akurat dan tepat.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Negara Thailand

Negara Thailand secara resmi bernama Kerajaan Thailand (The Kingdom Of Thailand), dalam bahasa Thailand sendiri disebut ราชอาณาจักรไทย dibaca Rāṭcha-āṇāchāk Thai, Rāja-ādnyācakra Thai, atau Prathēt Thai, Pradēsa Thai, atau Mueang Thai baca: "meng-thai", yang sama persis dengan versi bahasa Inggrisnya, yang berarti "Thailand". Negara Thailand adalah Monarki Konstitusional kesatuan yang dipimpin oleh Yang Mulia Raja Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua, sebagai raja kesepuluh yang berkuasa. Parlemen Thailand yang menggunakan sistem dua kamar disebut Majelis Nasional atau Rathasapha, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (Sapha Phuthaen Ratsadon) dengan 480 anggota dan Senat (Wuthisapha) dengan 150 anggota.

Thailand memiliki sumber daya ekonomi campuran, ekonomi utama negara itu sebagian besar didasarkan pada industri, pariwisata, jasa, dan sumber daya alam. Gambaran keseluruhan perekonomian Thailand pada tahun 2019, PDB negara tersebut adalah 16.879,0 miliar baht. Untuk ekspor, nilainya 7.627,7 miliar baht, sedangkan nilai impor nya 7.437,3 miliar baht.

Thailand memiliki keragaman budaya dan selalu menjaga adat dan tradisi, dengan tetap menyerap berbagai budaya dari luar, sehingga memperkaya khazanah budaya Thailand. Budaya Thailand dipengaruhi oleh ajaran agama, khususnya Buddhisme Theravada serta tradisi India, Cina, Khmer, dan lainnya dari semenanjung Asia Tenggara. Dengan jumlah penduduk sekitar 66.413.979 juta jiwa (Sumaher, M.O. 2021), sekitar 80% adalah orang Thailand, 10% Tionghoa, dan 3% Melayu. Selebihnya adalah etnis minoritas termasuk Mon, Khmer dan beberapa suku pegunungan (hilltribes).

Ada 5 agama utama yang diakui oleh pemerintah. Sekitar 89% menganut agama Buddha dari sekte Theravada. Islam adalah agama terbesar kedua dengan sekitar 10% penganut. Agama Kristen mayoritas Katolik sebanyak 0,7% dari populasi. Ada juga sekelompok kecil orang yang cukup berpengaruh yang menganut ajaran Sikh dan Hindu yang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Kelompok agama Kristen juga memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Thailand, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Semua kelompok masyarakat dapat hidup rukun dan memiliki kebebasan untuk memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Thailand. Raja adalah pelindung semua agama (Sumaher, M.O. 2021).

3.2 LGBTQ+ di Thailand

LGBT atau GLBT adalah singkatan dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini telah digunakan sejak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena lebih mewakili kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk menekankan keragaman "budaya berdasarkan seksualitas dan identitas gender". Selama dekade terakhir abad ke-20, jutaan orang Amerika menyaksikan aktris Ellen DeGeneres muncul di televisi nasional pada bulan April 1997, menandai era baru kekuatan selebritas gay dan visibilitas media. Artis dan selebriti, baik gay maupun heteroseksual, terus menjadi salah satu aktivis paling vokal yang menyerukan toleransi dan persamaan hak.

Bagian pertama abad ke-21 melihat penekanan baru pada aktivisme transgender dan meningkatnya penggunaan terminologi yang mempertanyakan identifikasi gender biner. Gambar wanita trans menjadi lebih umum di film dan televisi, begitu pula program dengan pasangan sesama jenis yang membesarkan anak. Transphobia, cissexism, dan bahasa lain (seperti "hir" dan "mereka") menjadi standar, dan program film dan televisi menampilkan karakter remaja dan dewasa trans secara lebih

terbuka. Aktivisme internet berkembang pesat, sementara banyak ruang pertemuan fisik publik yang pernah mendefinisikan aktivisme LGBT (bar, toko buku, festival musik wanita) mulai menghilang, dan penggunaan kata "aneh" menggantikan identifikasi lesbian bagi banyak aktivis wanita muda. Perhatian beralih ke aktivisme global karena keuntungan AS tidak diimbangi dengan undang-undang persamaan hak serupa di 75 negara lain di mana homoseksualitas tetap ilegal. Hingga 2016, identifikasi dan aktivisme LGBT masih dapat dihukum mati di sepuluh negara: Iran, Irak, Mauritania, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Uganda, dan Yaman, penderitaan komunitas LGBT di Rusia mendapat perhatian yang kuat selama Olimpiade Musim Dingin 2014, di mana Presiden Obama mengirimkan kontingen atlet LGBT. Pernyataan dukungan dari Paus Fransiskus yang baru ("Siapakah saya untuk menghakimi?") memberikan harapan bagi umat Katolik LGBT di seluruh dunia.

Bagi negara Thailand, setelah Thailand bertransisi dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional pada tahun 1932, negara mempropagandakan budaya nasional dengan menerapkan konsep gender tradisional sebagai salah satu alat untuk membangun tatanan sosial seperti yang diamati oleh Scot Barne, seorang peneliti tamu di History Research School of Pacific dan Kajian Asia di Australian National University dalam bukunya *Luang Wichit Wathakan and the Creation of a Thai Identity*; dan cendekiawan Thailand terkenal Thongchai Winichakul dalam bukunya *Siam Mapped: A History of the Geo-Body of a Nation*. Konsep kebangsaan Thailand pada saat itu termasuk pemaksaan gagasan "modern" tentang identitas gender dan orientasi seksual melalui institusi negara seperti militer, polisi, dan sekolah yang masih bertahan hingga saat ini. Melalui "modernisasi" ini, konstruksi moral Thailand disebarluaskan untuk secara inheren terjalin dengan peran gender Thailand — meniru gerakan kelas menengah Victoria di Eropa untuk menggambarkan Thailand sebagai "bangsa yang beradab" — yang tercermin dalam perasaan kebajikan pribadi.

Pada tahun 2015, Thailand memberlakukan Undang- Undang Kesetaraan Gender yang membuat diskriminasi berbasis gender menjadi ilegal. Namun, diskriminasi gender diperbolehkan jika berfungsi untuk melindungi "kesejahteraan dan keselamatan seseorang atau untuk mengikuti aturan agama, atau untuk keamanan negara" menurut Bagian 17 Undang-Undang tersebut. Kini, Bangkok sebagai ibu kota negara Thailand adalah pusat komunitas gay dan transgender Thailand. Mereka yang mengidentifikasi sebagai trans dapat menjalani kehidupan publik dan terbuka di Thailand, sesuatu yang mungkin tidak dapat mereka lakukan di belahan dunia lain. Namun prasangka buruk mengenai orang-orang "pelangi" masih ada Thailand (Iverson, K. 2017) dan negara masih belum mampu mendukung komunitas ini dengan menahan beberapa hak asasi manusia yang sangat mendasar. Misalnya, homoseksualitas tidak didekriminalisasi hingga tahun 1956, dan undang-undang tidak mengakui orientasi seksual atau mereka yang mengidentifikasi jenis kelamin yang berbeda dari jenis kelamin mereka. Dengan lanskap hukum seperti ini, terdapat alasan yang menjadikan begitu banyak transgender dan gay di Thailand Sementara komunitas gay di Bangkok cukup banyak.

Dalam komparasi dengan negara lain seperti dalam pembahasan sebelumnya mengenai peringkat negara Thailand dalam situs Equaldex yang menempati urutan ke tiga, dengan negara Laos menduduki peringkat pertama dan Filipina kedua terdapat pula komparasi mengenai beberapa hal yang justru membuktikan bahwa meskipun Thailand menempati urutan ketiga namun memberikan perlindungan dan konstitusi hukum lebih banyak daripada dua negara lainnya. Sebagaimana dalam gambar berikut:

Tabel 1 Komparasi Perlindungan Hukum untuk kaum LGBTQ+ di Negara Laos, Filipina dan Thailand menurut Equaldex

Hukum	Laos	Filipina	Thailand
Aktivitas Homoseksual	Legal	Legal	Legal
Pernikahan Sesama Jenis	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui	Tidak Diketahui
Penyensoran Isu LGBT	Tidak Disensor	Tidak Disensor	Tidak Disensor
Hak untuk mengubah jenis kelamin yang sah	Ambigu	Ambigu	Legal namun memerlukan tindakan bedah
Pengakuan hukum atas gender non-biner	Tidak Diketahui	Tidak diakui secara hukum	Tidak diakui secara hukum
Diskriminasi LGBT	Tidak ada perlindungan	Ilegal dalam beberapa konteks	Ilegal

Diskriminasi pekerja LGBT	Tidak ada perlindungan	Orientasi seksual saja	Orientasi seksual dan identitas gender
Adopsi	Ambigu	Single only	Ilegal
Melayani secara terbuka di militer	Legal	Legal	Legal

Sumber: <https://www.equaldex.com/compare/laos/philippines/thailand>

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari perspektif hukum, justru Thailand lebih mengakomodir perlindungan kepada kaum LGBTQ+ seperti contoh hanya negara Thailand yang melarang atau menganggap ilegal perlakuan diskriminasi terhadap orang-orang LGBTQ+, serta tindakan mengubah jenis kelamin yang sah juga legal di Thailand dengan catatan melalui prosedur operasi bedah. Sehingga dapat dikatakan meskipun menempati urutan ke 3 di negara ASEAN, nyatanya negara Thailand lebih unggul melindungi secara hukum kaum LGBTQ+. Dari fakta dan data yang disampaikan, mengenai negara Thailand yang dikenal sebagai negara Gajah Putih ini juga dapat dikatakan cukup populer dalam hal Ladyboy, salah satu fenomena dalam LGBTQ+.

3.3 Pengaruh Budaya dalam Pengambilan Keputusan di Thailand

Selama berabad-abad Thailand telah menjadi tempat pertemuan dua budaya, yakni Thailand menerima tradisi Buddha dan Brahmana dari India ke pandangan dunia dan prinsip spiritual sambil melakukan kontak dekat dan hubungan persahabatan dengan Cina. Dengan kata lain, orang Thailand secara spiritual dipengaruhi oleh India dan secara etnis terkait dengan Cina. Dalam dunia pendidikan formal di Thailand, hampir semua Universitas terdapat satu atau dua mata kuliah tentang konsep umum budaya dan budaya Thailand ditawarkan kepada mahasiswa sarjana, baik sebagai mata kuliah wajib, atau mata kuliah pilihan. Tidak ada pembinaan yang sistematis atau pembinaan khusus terhadap pengelola kebudayaan di lembaga pembinaan. Namun, ada lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengembangan pegawai negeri dan mereka telah menyelenggarakan kursus bagi para administrator dan pengambil keputusan di berbagai tingkatan (WWCD.org, 1998). Karena agama dianggap sebagai bagian dari budaya di Thailand, Departemen Agama juga mempromosikan kegiatan keagamaan dari semua denominasi serta menyebarkan masalah etika dan moral kepada masyarakat. Koordinasi kegiatan dan program seputar budaya berada pada tingkat menteri dan dilakukan oleh Kabinet Menteri.

Pembahasan

Tulisan ini akan menganalisa alasan Thailand melegalisasi aktivitas LGBT dan LGBTQ+ dan menjelaskan bagaimana sebuah budaya dapat mempengaruhi kebijakan, dalam kasus ini adalah budaya Kathoey mempengaruhi lahirnya kebijakan legalisasi aktivitas seksual LGBTQ+. Fenomena LGBT di Thailand dapat ditandai dalam sejarah tepatnya pada abad ke 14, dengan terjadinya perilaku homoseksualitas dan perilaku non-heteronormatif yang umum di antara anggota laki-laki dan perempuan terutama dalam kalangan kerajaan, saat periode Ayutthaya pada masa pemerintahan King Trailok. Kisah munculnya LGBT juga pernah terjadi dan dialami oleh salah satu bangsawan yang bernama Hmom Kraisorin dimana orang istana memiliki dugaan bahwa dia memiliki keintimann dengan seorang pria yang juga seorang penampil atau penghibur istana (History of Thai LGBTs, 2009).

Dalam perkembangan yang terjadi di Thailand dengan dasar pengaruh barat dan penyesuaian dengan agama Budha sekaligus kondisi masyarakat, Undang-undang awal Thailand mengkriminalisasi tindakan seksual daripada identitas atau orientasi seksual, namun sodomi pribadi, dewasa, konsensual, dan non-komersial didekriminalisasi pada tahun 1956 (UNDP, USAID 2014). Perkembangan dalam konotasi perlindungan hukum melalui konstitusi di Thailand kembali muncul dalam Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) bahwa kata Thailand 'phet' (seks) di Section 30 atau Bagian 30 akan dipahami sebagai perbedaan antara pria dan wanita, dan juga "perbedaan individu yang identitas gender, gender dan keragaman seksualnya berbeda dari jenis kelamin fisik mereka."

Catatan tentang penafsiran perihal konstitusional ini telah dijadikan sebagai faktor kunci dalam penafsiran hukum, meskipun tidak tertulis langsung dalam UUD. Misalnya, Bagian 30 Konstitusi B.E 2550 itu, dengan interpretasi yang diberikan dalam dokumen "niat", dikutip dalam keputusan Pengadilan Administratif untuk mencabut perintah Gubernur Chiang Mai yang melarang peserta transgender ikut serta dalam prosesi selama prosesi berlangsung. festival bunga tahunan provinsi pada tahun 2009 lalu.

Hal ini juga berlanjut hingga diakuinya gender ketiga di Thailand pada tahun 2015 melalui UU Kesetaraan Gender atau Gender Equality Act B.E 2558 yang saat ini merupakan instrumen hukum terkuat untuk mengadvokasi pengakuan gender legal di Thailand. Maksud di balik undang-undang ini adalah untuk melindungi orang-orang LGBTQ+ dari diskriminasi yang tidak adil dan memberikan akses ke proses hukum yang setara apakah orang itu laki-laki, perempuan atau anggota dari "kelompok keragaman seksual".

Section 3 (Bagian 3) dalam Undang-undang kesetaraan gender tersebut secara eksplisit mendefinisikan "diskriminasi gender" sambil mengklarifikasi bahwa itu tidak terbatas pada pria dan wanita, tetapi juga berlaku untuk orang yang memiliki "penampilan yang berbeda dari jenis kelaminnya sendiri sejak lahir". Undang-undang ini baru dan merupakan undang-undang pertama yang relevan dengan kesetaraan gender di Thailand. Akibatnya, pejabat masih dalam proses mengembangkan informasi tentang penegakannya, serta menyusun peraturan di bawah undang-undang. Proses ini termasuk mendefinisikan apa arti diskriminasi gender yang tidak adil serta kelompok orang yang ingin dilindungi oleh undang-undang ini, dan pembuatan pedoman untuk komite terkait tentang penegakan Undang-Undang tersebut.

Sedangkan perkembangan positif yang dinanti pejuang hak-hak LGBTQ+ Thailand pada tahun 2022 juga diraih atas disahkannya RUU Pernikahan Sesama Jenis di Thailand dan sekaligus aturan Civil Partnership Bill sekitar bulan Juni 2022 bertepatan dengan Pride Month. Mengenai Civil Partnership Bill ini adalah RUU yang benar-benar merupakan cerminan masyarakat dan norma yang berlaku saat ini, tidak hanya secara lokal tetapi juga secara global. RUU tersebut mendefinisikan pasangan sipil sebagai pasangan yang lahir dari jenis kelamin yang sama. Serikat sipil akan tersedia untuk menyetujui pasangan sesama jenis yang berusia minimal 17 tahun, selama setidaknya salah satu dari mereka adalah warga negara Thailand.

Civil Partnership akan memiliki hak hukum yang sama dengan orang yang menikah mengenai properti pribadi dan milik bersama, serta hak untuk mengadopsi anak. Ketika salah satu pasangan meninggal, yang lain akan memiliki hak waris yang sama seperti pasangan suami istri konvensional di bawah KUH Perdata dan Komersial, yang juga melarang laki-laki atau perempuan untuk menikah jika dia sudah memiliki pasangan sipil. Seorang pria atau wanita dapat menghadapi gugatan cerai jika dia memperlakukan orang lain di luar persekutuan sipil sebagai pasangan sipil. Berdasarkan amandemen tersebut, hak untuk menerima tunjangan hidup dalam kasus perceraian berakhir jika pihak yang menerima tunjangan tersebut menikah lagi atau mendaftarkan secara perdata.

Dari perkembangan dan penambahan pembahasan serta klausul baik yang menyebutkan kata LGBTQ+ seperti Gay secara langsung atau yang menyebutkan "Semua Gender" dalam konstitusi di Thailand menunjukkan bahwa negara gajah putih ini semakin memvalidasi keberadaan kaum LGBTQ+. Sehingga dalam karya ilmiah ini, yang perlu diperhatikan dalam menjelaskan tujuan dibalik itu adalah dengan menerapkan konsep Nation Culture Shaping Public Policy yang dapat menjawab tentang bagaimana dan mengapa budaya dalam suatu negara (Thailand) menjadi penting dan sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan sehingga menjadi sebuah kebijakan publik yang sah sesuai dengan pendapat Katherine Daniell (2014) sebagai berikut;

1. Adanya model aktor dan instrumen lokal
2. Keterlibatan internasional melalui generalisasi budaya nasional
3. Berdampak pada perilaku ekonomi, partisipasi politik, solidaritas sosial dan pembentukan nilai dan evolusi sebuah negara.

Adanya Model Aktor dan Instrumen Lokal

Dalam kaitan mengenai alasan dibalik legalnya aktivitas seksual LGBTQ+ di Thailand hal yang menjadi perhatian adalah landasan agama dan budaya di Thailand serta keberadaan Kathoey yang murni lahir dari Thailand sebelum adanya pengaruh barat atas LGBTQ+ masuk. Sehingga aktor yang disebutkan terdiri dari pemuka agama, dan tokoh-tokoh yang sekaligus menjadi bukti bahwa LGBTQ+ makin diterima.

Pemuka Agama : Bksu Ven. Shine Waradhammo

Venerable Shine Waradhammo telah menjadi pendukung yang tak terduga dari komunitas LGBT+ Thailand, seorang biksu Buddha berusia 52 tahun yang bekerja di luar batas-batas konservatif masyarakat Thai yang mayoritas beragama Buddha dan wilayah pejabat monastik Buddha yang bahkan

lebih terikat tradisi (buddhistdoor.net). Menurut Phra Waradhammo yang juga pembela legalisasi aborsi, menyatakan RUU Kemitraan Sipil tidak memberikan persamaan hak (penuh). Namun lebih baik agar mengubah Hukum Perdata.

“Sebagai seorang biksu, saya percaya bahwa ajaran Buddha harus ditafsirkan sesuai dengan realitas sosial. Jika tidak ditafsirkan seperti ini, mereka tidak berguna, Antara manusia dan agama, manusia harus didahulukan. Kita harus berusaha membebaskan orang dari penderitaan mereka. Jika kita ingin melindungi ajaran ini, kita harus menemukan cara untuk menafsirkannya sesuai dengan kehidupan dan adat istiadat masyarakat.”

Venerable Shine Waradhammo telah menjadi pendukung yang tak terduga dari komunitas LGBT+ Thailand, seorang biksu Buddha berusia 52 tahun. Dalam pernyataannya ia menyampaikan bahwa Sang Buddha tidak pernah mengatakan apa pun yang menentang orang LGBT, jadi itu adalah penafsiran yang sangat salah terhadap kitab suci yang mengarah pada bias dan penolakan terhadap orang LGBT, Para biksu umumnya menghindari pembicaraan tentang LGBT dan masalah gender, tetapi kita harus berbicara tentang masalah yang memengaruhi masyarakat, dan ajaran agama harus mencerminkan masa kini.

Tokoh Masyarakat Anne Jakrajutatip (Pebisnis)

Anne Jakrajutatip, saat ini menjadi salah satu taipan media paling terkenal di Thailand, bintang reality TV, dan pembela hak-hak trans. Pada tahun 2021, ia menjadi berita utama karena membeli Organisasi Miss Universe seharga \$20 juta atau sekitar 310 Miliar. Anne Jakrajutatip mengadvokasi perubahan undang-undang di Thailand. Jakrajutatip mengadvokasi perubahan undang-undang di Thailand, tetapi mengatakan reformasi tidak mungkin dilakukan dalam jangka pendek, terutama dengan Thailand yang akan mengadakan pemilu awal tahun depan. Anne Jakrajutatip menunjuk ke media Thailand dan industri hiburan, di mana orang trans memiliki kehadiran yang kuat, sebagai area yang membantu mendorong penerimaan yang lebih besar, dan berharap dia dapat menggunakan perannya untuk mempromosikan perubahan dan menginspirasi orang lain (Ratcliffe R, 2023). Menurut Anne bahwa Thailand adalah negara yang ramah untuk LGBTQ.

Tokoh Masyarakat Pauline Ngarmpring (Pebisnis dan Politisi)

Pauline Ngarmpring adalah seorang Transgender dari Partai Mahachon sekaligus kandidat transgender pertama Thailand untuk Perdana Menteri dalam Pemilu 2019. Sebelum transisi, ia dikenal sebagai CEO klub olahraga berpengaruh, eksekutif pemasaran, dan reporter, dan transisinya pada usia 49 tahun dilaporkan secara luas. Ia sering disebut "Caitlyn Jenner dari Thailand," dan ia menggunakan status selebritas dan koneksi medianya untuk menjangkau audiens baru dengan ceritanya yang sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh para transgender.

Tokoh dalam Pemerintahan Tanwarin Sukkhapsit

Tanwarin Sukkhapsit dikenal terutama sebagai sutradara film yang mendorong batasan representasi LGBT di sinema Thailand telah dilantik sebagai anggota parlemen transgender pertama di Thailand dalam Pemilu yang diadakan pada Maret 2019. Tanwarin memiliki visi bahwa dia dapat menggunakan kekuatannya sebagai Anggota Parlemen untuk “menjelaskan kepada orang-orang tentang keragaman orang di Thailand” dan untuk “memperjuangkan hak-hak orang LGBT.”

Instrumen Lokal

Instrumen lokal yang dimaksud di sini adalah seperti komunitas atau organisasi yang focus mengadvokasi Gerakan LGBTQ+ di Thailand. Adapun di Thailand ditemukan beberapa instrumen lokal seperti sebagai berikut.

1. Anjaree
2. Sapaan
3. TFAT (Thai Trans Female Association of Thailand)
4. RSAT (Rainbow Sky Association of Thailand)

Instrumen lokal ini hampir memiliki tujuan yang sama yaitu lebih memperjuangkan hak-hak LGBTQ+ di Thailand dan menentang segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kaum LGBTQ+.

Keterlibatan Internasional Melalui Generalisasi Budaya Nasional

USAID dan UNDP : Laporan yang diterbitkan oleh USAID dan UNDP ini mendokumentasikan presentasi dan diskusi yang dilakukan selama Dialog Komunitas LGBT Nasional Thailand yang diselenggarakan pada tanggal 21-22 Maret 2013 di United Nations Convention Centre, Bangkok, Thailand. Dialog Komunitas LGBT Nasional Thailand dan laporan nasional didukung oleh UNDP dan USAID melalui inisiatif regional 'Menjadi LGBT di Asia'. Mencakup delapan negara – Kamboja, Cina, Indonesia, Mongolia, Nepal, Filipina, Thailand, dan Vietna.

International Labour Organization (ILO) : Dalam terbitan resmi penelitian yang dilakukan ILO dalam Proyek PRIDE Organisasi Buruh Internasional (ILO), melalui terbitan Gender identity and sexual orientation in Thailand / Busakorn Suriyasarn ; ILO Country Office for Thailand, Cambodia and Lao People's Democratic Republic ; Promoting Rights, Diversity and Equality in the World of Work (PRIDE) Project. – Bangkok : ILO, 2014

Dampak Perilaku Ekonomi Sebuah Negara.

Apa yang terjadi dalam sebuah negara dan berkaitan langsung dengan identitas masyarakat, dalam hal seperti budaya, maka dapat mempengaruhi rantai faktor kehidupan lainnya, baik itu ekonomi, politik dan sebagainya. Industri pariwisata memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan untuk negara. Selama beberapa dekade, pariwisata merupakan salah satu penghasil devisa utama Thailand. Saat ini, sektor ini menyumbang hampir 20% dari PDB negara, termasuk pendapatan pariwisata tidak langsung selain menyumbang 15,5% dari tingkat lapangan kerja (Bangkok Bank, 2019). Seperti beberapa negara bagian lain, Thailand bertaruh pada peningkatan kuantitatif jumlah turis selama beberapa dekade.

Thailand sendiri juga sangat terkenal dengan destinasi wisata seks yang memang disuguhkan oleh negara ini sebagai salah satu daya tarik bagi para wisatawan asing. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa banyak tempat prostitusi berkedok bar-bar, panti pijat, tempat karaokean dll yang dibuka di Thailand. Tempat-tempat seperti ini tersebar di beberapa wilayah di Thailand khususnya di wilayah yang menjadi objek destinasi wisata, sehingga tidak akan sulit bagi para wisatawan asing untuk menemukannya (Molasy, H. D., & Febrina, S. 2022).

Dalam lima hingga sepuluh tahun terakhir, wisatawan Asia menjadi mayoritas yang berwisata ke Thailand. Pariwisata secara umum (dan pariwisata LGBTQ) di Thailand menjadi sangat populer di kalangan masyarakat Asia karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi di banyak negara Asia, hingga Bangkok telah menjadi episentrum pesta gay regional. Hingga dalam sektor pariwisata LGBT Thailand terdapat tempat hiburan khusus. Dari Tabel 2 sebanyak 228 tempat infrastruktur yang ramah akan pelancong LGBT tercatat di Thailand dan tersebar di empat daerah utama atau pusat industri pariwisata Thailand. Adapun destinasi tersebut terdiri dari bar, klub malam, sauna, restoran dan hotel.

Tabel 2 Infrastruktur Pariwisata Gay di Thailand

Fasilitas Gay	Bangkok	Pattaya	Phuket	Chiang Mai
Bar	22	21	4	6
Klub Malam	6	2	1	2
Sauna dan Tempat Pijat	28	4	5	4
Restoran (Diiklankan Ramah LGBT)	19	7	12	3
Hotel (Diiklankan Ramah LGBT)	30	9	26	17
Total	105	43	48	32
Jumlah			228	

Sumber: Veilleux, Alexandre, 2021.

Dari tabel tersebut juga dapat dikatakan bahwa penerimaan secara terbuka dari Thailand pada komunitas LGBTQ+ juga cukup terlihat dari industri-industri yang ada. Selain industri film yang cenderung banyak dijalankan oleh perusahaan swasta, pemerintah Thailand juga mulai memperhatikan

industri yang berorientasi pada pink money. Pink Money, juga dikenal sebagai ekonomi Pink atau Pink Market, adalah istilah untuk menggambarkan daya beli komunitas LGBTQ+ sebagai konsumen.

Go Thai Be Free

Pemerintah Thailand telah memperlihatkan komitmen untuk mengimplementasikan pink capitalism di sektor pariwisata. Pada 23 Januari 2019, Tourism Authority of Thailand (TAT) meluncurkan kampanye progresif bertajuk "Go Thai Be Free" (Howell, C. 2019). Kampanye ini merupakan bagian dari nation branding Thailand bertajuk "Amazing Thailand". Tujuan utama peluncuran kampanye Go Thai Be Free adalah untuk mempromosikan Thailand sebagai tujuan wisata yang ramah bagi komunitas LGBTQ+.

Melalui penjelasan dan fakta yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapati yakni bidang kepariwisataan merupakan salah satu bidang unggulan penyumbang pendapatan bagi negara Thailand. Sebelum meluncurkan kampanye Go Thai Be Free, TAT Thailand telah meluncurkan berbagai kampanye pariwisata untuk membantu membangun nation branding. Diantaranya adalah "We Love Thailand" di tahun 2020, "#OpenThailandSafely" di tahun 2021, "Travel From Home" di tahun 2020, dan seterusnya. Seluruh peluncuran kampanye pariwisata ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Thailand pengembangan bidang kepariwisataannya.

4. Conclusions

Thailand yang terletak pada Kawasan ASEAN yang cukup konservatif mengenai LGBTQ+ justru mengambil langkah yang cukup berani untuk melegalkan LGBTQ+. Menilik dari jejak sejarah terkait LGBTQ+ di Thailand, praktik homoseksual telah lama terjadi di Thailand sejak abad ke 14. Dari segi agama Buddha Theravada sebagai agama mayoritas yang dianut, mengakui empat kategori gender yaitu laki-laki, perempuan, pandaka dan ubhatobyanjanaka. Dimana pandaka dan ubhatobyanjanaka mengacu pada Kathoey.

Kathoey dan fenomena LGBTQ+ sendiri di Thailand memang tidak semuanya dilindungi dalam segi konstitusi, namun hingga di tahun 2022 sudah ada beberapa payung hukum seperti Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2550 (2007) dan Gender Equality Act B.E 2558 (2017). Selain itu masih banyak juga hal-hal yang secara norma sosial diperbolehkan di Thailand tetapi tidak tertulis (dalam konstitusi), seperti legal untuk mengganti jenis kelamin dan boleh pasangan sesama jenis untuk tinggal bersama. Legalisasi tersebut dipengaruhi oleh budaya yang sangat toleran sehingga menjadi produk politik. Dalam penelitian ini menggunakan konsep Nation Culture Shaping Public Policy oleh Katherine Danielle untuk menjelaskan alasan dibalik Legalisasi Aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBTQ+) di Thailand dalam tiga poin yaitu:

1. Adanya aktor dan instrumen lokal
2. Generalisasi budaya melalui keterlibatan internasional
3. Adanya dampak terhadap perilaku ekonomi sebuah Negara

References*

- [1] Albayumi, Fuat. Soft Law Sebagai Sebuah Strategi : Studi Kasus Piagam Asean (Asean Charter). Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional : SPEKTRUM Vol. 12, No. 2, Juli 2012. Diakses dari <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/SPEKTRUM/article/download/474/596>. Pada 23 Maret 2023
- [2] Drucker, P. (2015). *Warped: Gay Normality and Queer Anti-Capitalism*. Leiden: BRILL.
- [3] Molasy, H. D., & Febrina, S. (2022). *Perdagangan Anak di Thailand*. Kota Bandung: PT. Indonesia Emas Group. <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/perdagangan-anak-di-thailand>
- [4] Iverson, Kelly. 2017. A Brief History of Thailand's Transgender Community. Dari website theculturetrip. Diakses dari: <https://theculturetrip.com/thailand/articles/a-brief-history-of-thailands-transgender-community/?amp=1>. Pada 18 Desember 2022
- [5] Jackson, P. (1995). Kathoey: The third sex. In Jackson, P., *Dear Uncle Go: Male homosexuality in Thailand*. Bangkok, Thailand: Bua Luang Books
- [6] Jackson, P. (1998). Male homosexuality and transgenderism in the Thai buddhist tradition. In Leyland, W. (Ed.) *Queer dharma: Voices of gay buddhists*. San Francisco, USA: Gay Sunshine Press

- [7] Kartini Kartono. (1989). Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual. Bandung: CV. Mandar Maju
- [8] Lewis, R.D. (2006) When Cultures Collide: Leading Across Cultures, 3rd Edition, Boston, MA: Nicolas Brealey
- [9] Mugasejati, Nanang P. "Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 10, no. 2, 1 Nov. (2006), pp. 121-141, doi:[10.22146/jsp.11015](https://doi.org/10.22146/jsp.11015).
- [10] UNDP, USAID. (2014). Being LGBT in Asia: Thailand Country Report | A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society. Bangkok.
- [11] Bangkok Post. (2019). Prayut: Zones vital for growth . Dipetik Desember 7, 2020, dari Bangkok Post Web Site: <https://www.bangkokpost.com/business/1753349/prayut-zones-vital-for-growth>. Pada 18 Desember 2022
- [12] Howell, C. (2019). TAT Launches Video to Promote Thailand as Safe For LGBT+ Tourists. Diakses dari dari BK Asia City: <https://bk.asia-city.com/things-to-do-bangkok/news/tat-launches-video-to-promote-thailand-safe-lgbt-tourists>. Pada 18 Desember 2022
- [13] IMF (International Monetary Fund). (2018). Prospek Ekonomi Thailand dalam Enam Bagan. Diakses dari IMF Web Site: <https://www.imf.org/id/News/Articles/2018/06/07/NA060818-Thailands-Economic-Outlook-in-Six-Charts>. Pada 18 Desember 2022
- [14] Jackson, P. (1996). Non-normative sex/gender categories in the Theravada Buddhist Scriptures. Diakses dari : <http://buddhistlinks.org/Homosexual.htm>. Pada 18 Desember 2022
- [15] Mastercard. (2019). Global Destination Cities Index 2019. New York: Mastercard. <https://newsroom.mastercard.com/wp-content/uploads/2019/09/GDCI-Global-Report-FINAL-1.pdf>. Pada 18 Desember 2022
- [16] Ratcliffe R. (2023). ‘To gain respect, you need success’: the trans tycoon from Thailand who bought up Miss Universe. Diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2023/jan/05/anne-jakrajutatip-trans-tycoon-miss-universe-thailand>. Pada 07 Januari 2023
- [17] Reuters. (2013). Survey finds worldwide split over attitudes toward gays. Diakses dari: <https://www.reuters.com/article/us-gays-survey-idUKBRE95312L20130604>. Pada 23 Oktober 2022
- [18] Rio, M. D. (2021). What is the pink economy or pink money? Meet this powerful market that is in full growth. Diakses dari : <https://www.entrepreneur.com/article/375730>. Pada 18 Desember 2022
- [19] Transworldview.com. (2019). Three Transgender Leaders Changing the Face of Thai Politics. Diakses dari: <https://transworldview.com/three-transgender-leaders-changing-the-face-of-thai-politics/>. Pada 18 Desember 2022
- [20] TAT Newsroom. (2020). Tourism Authority of Thailand launches “Travel From Home with Amazing Thainess” campaign. Diakses dari TAT News: <https://www.tatnews.org/2020/05/tourism-authority-of-thailand-launches-travel-from-home-with-amazing-thainess-campaign/>. Pada 18 Desember 2022
- [21] Veilleux, Alexandre. (2021). LGBTQ Tourism in Thailand in the Light of Glocalization: Capitalism, Local Policies, and Impacts on the Thai LGBTQ Community. Milan: FrancoAngeli, Nuove Geografie. Strumenti di lavoro. Diakses dari : <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/53224>. Pada 23 Desember 2022
- [22] WWCD.org. (1998). Cultural Policy in Thailand. Diakses dari : Webster's World of Cultural Policy: <http://www.wwcd.org/policy/clink/Thailand.html>. Pada 18 Desember 2022